

## PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Hariati<sup>1</sup>, Ikhsan<sup>2</sup>, Dwi Sepriono Nur<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmul

<sup>2,3</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmul

Alamat Korespondensi : hariatiunex@gmail.com

**Abstract:** *In the era of regional autonomy, the development of micro, small and medium enterprises is one of the fields of government which is the mandatory authority that is handed over to the district/city governments. Then the local government has free to explore and develop the potential of micro, small and medium enterprises in accordance with the capabilities of each region. The efforts of industry, trade, cooperative and micro, small and medium enterprises in the form of growth in the business climate, growth of new business units, and the development of micro, small and medium enterprises have been carried out well by carrying out seven aspects of service ranging from production, marketing, capital, human resource development, institutional to information technology. However, there is still a need for another form of strategy that will strongly support all of these efforts, namely by forming a learning site that will be dedicated to fostering business actors in a sustainable and systematic manner.*

**Keywords:** *micro, small and medium enterprises, development, businessmen.*

**Abstrak:** *Di era otonomi daerah, pembangunan UMKM merupakan salah satu bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan wajib yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Maka pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam menggali dan mengembangkan potensi UMKM sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah. Upaya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam pengembangan UMKM berwujud pada pertumbuhan iklim usaha, pertumbuhan unit-unit usaha baru dan pembinaan UMKM telah dilaksanakan secara baik dengan melakukan tujuh aspek pelayanan mulai dari produksi, pemasaran, permodalan, pengembangan SDM, kelembagaan hingga informasi teknologi. Namun demikian, masih diperlukan satu bentuk strategi lain yang akan sangat mendukung kesemua upaya tersebut yaitu dengan membentuk pusat pengkajian, analisis dan permodelan pusat pembelajaran (learning site) yang akan diperuntukkan bagi pembinaan para pelaku usaha secara berkelanjutan dan sistematis.*

**Kata Kunci :** *UMKM, pengembangan, pelaku usaha.*

### Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan sekaligus dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, pendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh penempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah menyatakan bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997 sektor UMKM merupakan sektor yang tangguh dan berdaya tahan prima terhadap terpaan badai krisis, karena UMKM memiliki tingkat adaptasi yang tinggi sehingga ketika terjadi perubahan akan cepat menyesuaikan diri. Di Indonesia, UMKM menjadi sangat penting sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja atau pendapatan. Fakta ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang diciptakan oleh kelompok usaha tersebut jauh lebih banyak dibandingkan tenaga kerja yang bisa diserap oleh usaha besar. Karena itu UMKM sangat diharapkan untuk bisa terus berperan optimal dalam upaya menanggulangi pengangguran yang jumlahnya cenderung meningkat setiap tahunnya. Dengan banyak menyerap tenaga kerja, berarti UMKM juga mempunyai peran strategis dalam upaya pemerintah memerangi kemiskinan dalam negeri.

Pemerintah kemudian menyadari akan pentingnya pengembangan kegiatan UMKM yang dianggap sebagai salah satu alternatif penting yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. Sebab UMKM merupakan langkah awal dari perwujudan kewirausahaan yang terbentuk dan merupakan salah satu kegiatan usaha dominan yang dimiliki bangsa Indonesia. Selain itu, pengembangan kegiatan UMKM relatif tidak memerlukan modal yang besar dan dalam periode krisis selama ini UMKM relatif bertahan.

Sejalan dengan otonomi daerah, pembangunan UMKM merupakan salah satu bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan wajib yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, konsekuensinya pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam menggali dan mengembangkan potensi UMKM sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah. Para pengusaha UMKM dengan berbagai keterbatasannya perlu difasilitasi, digerakkan dan dimotivasi sehingga semakin berkembang naluri kewirausahaannya dengan upaya-upaya terpadu dan terencana. Wirausaha dapat mendayagunakan segala sumberdaya yang dimiliki, dengan proses yang kreatif dan inovatif, menjadikan UMKM siap menghadapi tantangan krisis global.

Masalah yang sering dirasakan langsung oleh pelaku UMKM secara umum maupun di Provinsi Kalimantan Timur secara khusus saat ini adalah mulai dari minimnya modal usaha, tidak mengertinya pelaku UMKM terhadap manajemen usaha, sertifikasi produk sampai pada bagaimana cara memasarkan secara efektif hasil produk dari UMKM. Bagi UMKM, permodalan menjadi masalah utama yang dirasa cukup penting diatasi melalui kredit dalam rangka meningkatkan kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja usahanya, yang diperlukan guna menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi penumpukan modal kerja. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah meluncurkan program pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur merupakan instansi paling berwenang yang memiliki peran untuk selalu memberdayakan UMKM menjadi harapan bagi pelaku UMKM, karena hasil dari peranan tersebut bisa meningkatkan taraf hidup pelaku UMKM di Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur, perkembangan usaha mikro di Provinsi Kalimantan Timur hingga akhir tahun 2013 tampak pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1.**  
**Perkembangan Usaha Mikro di Provinsi Kalimantan Timur**

Tahun	Industri (Unit)	Perdagangan (Unit)	Jasa (Unit)	Jumlah (Unit)	Omset (Juta Rupiah)
2009	3.825	7.777	2.544	14.146	20.603,79
2010	4.820	9.410	3.699	17.929	46.000,00
2011	5.065	9.560	3.743	18.368	46.637,00
2012	5.645	10.707	4.172	20.524	52.233,00
2013	9.720	18.443	7.176	35.339	89.935,00

Sumber : Diolah dari Disperindagkop dan UKM Provinsi Kaltim, 2016.

Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan usaha mikro di Provinsi Kalimantan Timur senantiasa meningkat, baik untuk sektor industri, perdagangan maupun jasa, baik jumlahnya maupun omsetnya. Berikutnya tersaji data perkembangan usaha kecil di Provinsi Kalimantan Timur:

**Tabel 2.**  
**Perkembangan Usaha Kecil di Provinsi Kalimantan Timur**

Tahun	Industri (Unit)	Perdagangan (Unit)	Jasa (Unit)	Jumlah (Unit)	Tenaga Kerja (orang)	Omset (Juta Rupiah)
2009	304.102	36.231	26.075	366.408	737.592	10.222,64
2010	308.393	39.921	29.099	377.413	759.648	93.373,00
2011	310.995	45.028	31.863	388.886	782.741	95.327,00
2012	323.434	46.829	33.138	406.006	814.051	99.140,00
2013	326.211	49.185	33.69	409.086	820.238	99.893,00

Sumber : Diolah dari Disperindagkop dan UKM Provinsi Kaltim, 2016.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa perkembangan usaha kecil di Provinsi Kalimantan Timur senantiasa meningkat, baik untuk sektor industri, perdagangan maupun jasa, baik jumlah unit usahanya, jumlah tenaga kerjanya maupun omsetnya. Berikutnya tersaji data perkembangan usaha menengah di Provinsi Kalimantan Timur:

**Tabel 3.**  
**Perkembangan Usaha Menengah di Provinsi Kalimantan Timur**

Tahun	Industri (Unit)	Perdagangan (Unit)	Jasa (Unit)	Jumlah (Unit)	Tenaga Kerja (orang)	Omset (Juta Rupiah)
2009	109	426	282	817	14.103	2.308.693
2010	112	433	288	833	14.167	2.656.127
2011	125	440	294	859	14.609	2.754.002
2012	131	466	311	908	14.857	2.987.300
2013	133	473	315	921	15.069	3.030.018

Sumber : Diolah dari Disperindagkop dan UKM Provinsi Kaltim, 2016.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa perkembangan usaha menengah di Provinsi Kalimantan Timur senantiasa meningkat, baik untuk sektor industri, perdagangan maupun jasa, baik jumlah unit usahanya, jumlah tenaga kerjanya maupun omsetnya.

Dari perkembangan seluruh jumlah unit UMKM mulai dari mikro hingga menengah, sektor dagang menjadi sektor terbesar pada UMKM yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur maka tidak diragukan lagi peranannya yang dapat meningkatkan pendapatan pada masyarakat khususnya masyarakat kelompok rendah dan telah banyak menyerap tenaga kerja bahkan telah memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan jumlah yang sangat besar serta dari berbagai sektor maka dibutuhkan peran serta Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan, guna meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM dalam meningkatkan perekonomian daerah hingga nasional melalui dinas, badan, dan kantor.

Walaupun tren perkembangan UMKM di Provinsi Kalimantan Timur senantiasa meningkat, namun berdasarkan observasi awal diketahui bahwa peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan UMKM belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan program pemberdayaan yang sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, karena masih ada permasalahan-permasalahan yang diantaranya adalah banyaknya pelaku UMKM yang belum memiliki ijin (legalitas) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (IUMK) dan minimnya sosialisasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur tentang program pemerintah khususnya Kementerian UMKM dan Koperasi tentang fasilitas bantuan modal usaha. Penelitian inipun bermaksud menganalisis peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam pengembangan UMKM di Provinsi Kalimantan Timur.

### **Kerangka Teori**

Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sangat relevan bagi paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial. Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumberdaya materi dan non material.

Korten dalam Hikmat (2001:16) menyatakan bahwa ada tiga dasar untuk perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat.

1. Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga dan komunitas.
2. Mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem swaorganisasi.
3. Mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

Usaha Mikro Kecil dan menengah atau yang lebih dikenal UMKM adalah jenis usaha yang paling mendominasi dalam struktur perekonomian di masyarakat. UMKM tumbuh subur dan berkembang di tengah perekonomian masyarakat saat ini yang meliputi jenis usaha perdagangan, pertanian, perikanan dan usaha jasa lainnya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah jenis usaha yang paling banyak jumlahnya di Indonesia. Tambunan (2009:10) menyatakan bahwa definisi dan konsep UMKM berbeda menurut setiap negara. Oleh karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara. Tidak ada kesepakatan umum dalam membedakan sebuah usaha mikro dan usaha kecil atau sebuah usaha kecil dari sebuah usaha menengah, dan usaha besar. Bahkan di banyak negara, definisi UMKM berbeda antar sektor, misalnya di Thailand, India dan Cina, atau bahkan berbeda antar lembaga atau departemen pemerintah, misalnya; Indonesia dan Pakistan.

Nurhayati (2011:102) menyebutkan definisi UMKM memiliki beragam variasi yang sesuai menurut karakteristik masing-masing negara yaitu :

1. *World Bank* : UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja  $\pm$  30 orang, pendapatan per tahun US\$ 3 juta dan jumlah aset tidak melebihi US\$ 3 juta.
2. Di Amerika : UKM adalah industri yang tidak dominan di sektornya dan mempunyai pekerja kurang dari 500 orang.
3. Di Eropa : UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-40 orang dan pendapatan per tahun 1-2 juta Euro, atau jika kurang dari 10 orang, dikategorikan usaha rumah tangga.
4. Di Jepang : UKM adalah industri yang bergerak di bidang *manufacturing* dan *retail/ service* dengan jumlah tenaga kerja 54-300 orang dan modal ¥ 50 juta-300 juta.
5. Di Korea Selatan : UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja  $\leq$  300 orang dan aset  $\leq$  US\$ 60 juta.
6. Di beberapa Asia Tenggara : UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-15 orang (Thailand), atau 5 -10 orang (Malaysia), atau 10-99 orang (Singapura), dengan modal  $\pm$  US\$ 6 juta.

Pada dasarnya definisi UMKM menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, didefinisikan sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian

baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Kriteria UMKM berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tampak pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4. Kriteria UMKM

No	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	USAHA MIKRO	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	USAHA KECIL	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3	USAHA MENENGAH	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber : Diolah dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama UMKM adalah kemampuannya mengembangkan proses bisnis yang fleksibel, berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dengan menanggung biaya yang relatif rendah.

### Metode Penelitian

Pengembangan UMKM dalam penelitian ini dikaji melalui fokus pertumbuhan iklim usaha, pertumbuhan unit-unit usaha baru, dan pembinaan UMKM. UMKM yang menjadi obyek penelitian adalah seluruh UMKM yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sesuai data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur. Sumber data primer adalah informan penelitian dari pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap informan sedangkan studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan alat analisis model interaktif yang dikemukakan oleh Milles, Huberman dan Saldana (2014:31-33).

### Hasil dan Pembahasan

Mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 3, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan untuk menumbuh-kembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Maka peran UMKM memiliki posisi yang strategis dan penting. Disamping itu, secara konseptual pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sistem pemberdayaan para pelaku dunia usaha UMKM secara mandiri. Keberhasilan pemberdayaan tersebut sangat bergantung pada tingkat partisipasi para pelaku usaha maupun *stakeholder* lain yang turut berperan dalam sistem permodalan, pengembangan alih teknologi dan pemasaran. Pengembangan UMKM tersebut harus sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan, dalam hal ini terutama permasalahan ketersediaannya bahan baku dan tenaga kerja yang handal terlatih, sedangkan pemerintah dapat mengambil peran dalam pengenalan dan penyediaan pasar yang lebih luas melalui pelaksanaan

pameran hasil produksi UMKM maupun penarikan investor dengan memberikan stabilitas kondisi pasar dan alur distribusi hasil produksi. Dengan melibatkan para pelaku usaha untuk lebih partisipatif maka terbangun sebuah sistem yang bersifat *bottom-up* dan tidak lagi mengandalkan pendampingan dari pemerintah atau secara *top-down*.

Terkait dengan pertumbuhan iklim usaha, strategi yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur yaitu dengan melakukan beberapa pendekatan sebagai berikut :

1. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Titik tolak pengukurannya adalah pengenalan bahwa setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Potensi inilah yang kemudian dikembangkan dan dijadikan motivasi dan pendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya jiwa wirausaha sebagai langkah perbaikan struktur ekonomi masyarakat.
2. *Empowering*, dimana potensi yang dimiliki tersebut diperkuat dengan daya yang dimiliki oleh masyarakat. Penciptaan iklim atau suasana usaha yang positif akan mendorong terciptanya masukan (*input*) serta pembukaan akses dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang ada. Dalam rangka pemberdayaan ini target pokok adalah meningkatnya taraf pendidikan dan keahlian dalam mengembangkan usaha termasuk di dalamnya pengembangan prasarana fisik seperti perbaikan jalan, listrik, alih teknologi pengolahan serta keahlian individual para pelaku usaha. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini harus mampu menyediakan wadah-wadah pembelajaran peningkatan *skill* dan pengetahuan serta keahlian para pelaku usaha sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi.
3. *Protecting*, dimana diperlukan pula adanya perlindungan terhadap pelaku usaha dengan arti memberdayakan dan melindungi kelangsungan usaha tersebut. Dalam proses pemberdayaan tersebut harus dicegah kondisi yang lemah semakin lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Pemberdayaan tersebut mengacu pada artian tidak menjadikan masyarakat pelaku usaha menjadi ketergantungan dengan program pemberian (*charity*) namun mengarahkan para pelaku usaha untuk mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan jaman dan persaingan bisnis dengan pelaku bisnis yang berbasis korporat. *Protecting* dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan bank-bank konvensional dalam hal pemberian kredit pinjaman modal usaha yang berbungan rendah serta peningkatan kemampuan teknologi pengolahan dalam hal produksi barang. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan jaringan usaha dimana para pelaku usaha tidak hanya berinteraksi dengan sesama pelaku usaha di daerah saja namun didorong untuk dapat berinteraksi dengan para pelaku usaha dari daerah lain. Hal ini juga dapat dicapai dari pelaksanaan gelaran pameran dan sebagainya, sehingga dengan terjalannya sebuah jaringan usaha yang lebih luas diharapkan dapat membuka wawasan para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya sendiri.

Pertumbuhan iklim usaha memang sangat erat hubungannya dengan perizinan bagi pelaku UMKM untuk memudahkan dalam mengakses kredit untuk pembiayaan UMKM dan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satunya dengan menerbitkan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) yang diharapkan dapat membantu UMKM yang mengakses kredit. Dengan adanya pemberian fasilitas kredit diharapkan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan iklim usaha menjadi lebih baik dan berdampak pada peningkatan dan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat, dengan kata lain iklim yang kondusif menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk berusaha di Kalimantan Timur akan meningkat. Dengan adanya kegiatan tersebut akan memicu pertumbuhan UMKM, kenaikan tersebut secara langsung akan memicu pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pada sisi lain, kemampuan adaptasi usaha dan keberlangsungan hidup UMKM juga dapat tercapai dengan peningkatan daur hidup produk usaha yang dihasilkan, kemampuan memobilisasi modal, memanfaatkan sumberdaya alam, menciptakan pasar dan mempertahankan bisnis yang ada. Kombinasi dari kemampuan tersebut akan mampu meningkatkan kapasitas produksi untuk memanfaatkan kesempatan menjadi kegiatan yang menguntungkan sehingga orientasi dan motivasi pelaku usaha dapat terus dirangsang menuju pelaku usaha yang mandiri.

Kemudian terkait dengan pertumbuhan unit-unit usaha baru, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan, perkembangan tersebut tidak terlepas dari perkembangan serta peningkatan jumlah unit usaha di semua sektor, baik dari jumlah maupun jenis usaha yang dilakukan oleh pelaku UKM yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini memberikan sinyal dan tren positif bagi perkembangan ekonomi daerah serta memberikan dampak langsung bagi perkembangan Provinsi Kalimantan Timur. Hingga tahun 2016 menurut data dari Bidang Pemberdayaan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur mencatat pertumbuhan UKM setiap tahun meningkat, baik dari jumlah maupun jenis usaha yang oleh pelaku UKM di Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur terus eksis mendorong pertumbuhan perekonomian melalui UMKM, sehingga jumlahnya terus mengalami peningkatan dari 446.454 unit tahun 2015 naik menjadi 553.097 unit tahun 2016, dengan kutipan wawancara sebagai berikut: “jumlah usaha mikro dari 266.524 tahun 2015 naik menjadi 270.469 unit tahun 2016. Kemudian usaha kecil dari 179.158 unit tahun 2015 naik menjadi 281.840 unit tahun 2016. Sedangkan untuk usaha menengah dari 772 unit tahun 2015 naik menjadi 788 unit tahun 2016, sehingga jumlah keseluruhan dari 446.464 tahun 2015 naik menjadi 663.097 unit tahun 2016”.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur juga menambahkan bahwa: “Sektor usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) sebagai salah satu penggerak ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah, khususnya untuk membuka



kesempatan berusaha dan bekerja hingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Terkait dengan pembinaan UMKM, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur mengemukakan bahwa: “Kenaikan jumlah UMKM (yang telah disampaikan sebelumnya) tentu tidak terlepas dari usaha Disperindagkop dan UKM dalam pembinaan berbagai aspek peningkatan sumberdaya manusia para pelaku UMKM, baik melalui berbagai pelatihan maupun seminar dan sosialisasi. Selain itu, kita juga melakukan pembinaan-pembinaan kegiatan kelembagaan, seperti mempermudah pemberian perijinan, memberikan dukungan dengan sertifikat halal. Kemudian aspek kemudahan dalam memperoleh permodalan dengan bunga rendah seperti KUR dari Kementerian Koperasi maupun dari perbankan”.

Pengembangan dan efektifitas program UMKM di Provinsi Kalimantan Timur memang harus dibangun secara partisipatif dan diperkaya dengan adanya pusat pengkajian, analisis dan permodelan pusat pembelajaran (*learning site*) kepada para pelaku usaha yang dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis. Hal ini dapat menjadi alternatif dalam mengatasi kekurangannya jumlah tenaga pendamping profesional dan kondisi geografis wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang berbeda-beda.

Untuk mencapai efektifitas yang lebih baik dalam upaya pengembangan UMKM di Provinsi Kalimantan Timur, maka langkah-langkah lain yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas SDM dan jiwa kewirausahaan melalui *learning site*. Kemudian memperkuat dan meningkatkan akses dan transfer teknologi bagi UMKM dan pengembangan UMKM agar semakin inovatif, para pelaku usaha tidak terbatas lagi oleh penggunaan teknologi yang tradisional namun juga dapat dilakukan secara modern dan meningkatkan hasil produksi serta menekan biaya yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya adalah dengan memfasilitasi UMKM berkaitan dengan akses informasi dan promosi dengan pangsa pasar dalam dan luar negeri. Hal ini dilakukan untuk memperluas akses pasar yang dapat dijangkau oleh para pelaku usaha sehingga tidak hanya berpatokan pada pasar domestik daerah saja, namun dapat merambah pada pasar nasional bahkan internasional, terutama untuk produk-produk unggulan daerah yang tentunya memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan atau memiliki wilayah distribusi yang lebih luas.

Berkenaan dengan hal itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur menambahkan bahwa: “Dari segi produksi, Disperindagkop selalu mensosialisasikan terkait dengan perbaikan-perbaikan di dalam peningkatan kualitas produksi maupun menggali potensi produk unik yang bisa dipasarkan. Begitu juga aspek pemasaran, Disperindag juga selalu mendorong para pelaku UMKM untuk kegiatan pemasaran, termasuk juga kerjasama dengan ritel, sehingga produk-produk yang dihasilkan UMKM bisa dipasarkan disana. Termasuk kerjasama dengan pengusaha hotel termasuk jasa travel yang bisa menyajikan produk UMKM, termasuk pemasaran secara *online* yang merupakan kerjasama dengan PT. Telkom”.

Lebih lanjut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur menyatakan: "Intinya tujuh aspek pelayanan sudah kita lakukan dalam upaya peningkatan UMKM, mulai dari produksi, pemasaran, permodalan, pengembangan SDM dan kelembagaan dengan informasi teknologi. Kerjasama semua itu terus kita lakukan, sehingga dampaknya jumlah UMKM di Kaltim semakin meningkat dari tahun ke tahun," jelasnya.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Upaya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam pengembangan UMKM berwujud pada pertumbuhan iklim usaha, pertumbuhan unit-unit usaha baru dan pembinaan UMKM telah dilaksanakan secara baik dengan melakukan tujuh aspek pelayanan mulai dari produksi, pemasaran, permodalan, pengembangan SDM, kelembagaan hingga informasi teknologi. Namun demikian, masih diperlukan satu bentuk strategi lain yang akan sangat mendukung kesemua upaya tersebut yaitu dengan membentuk pusat pengkajian, analisis dan permodelan pusat pembelajaran (*learning site*) yang akan diperuntukkan bagi pembinaan para pelaku usaha secara berkelanjutan dan sistematis.

Peneliti merekomendasikan beberapa saran, diantaranya 1) Adanya sosialisasi dan penyuluhan kepada para agen UMKM kepada masyarakat untuk membuka pangsa pasar yang lebih luas serta menarik minat para masyarakat untuk menjadi pelaku usaha, 2) Temu kemitraan perlu diselenggarakan lebih sering antara pelaku UMKM dan perbankan agar makin banyak pelaku UMKM yang dapat mengakses kegiatan tersebut guna meningkatkan kapasitas maupun kuantitas pelaku UMKM itu sendiri, 3) Adanya penyelenggaraan gelaran pameran hasil produksi pelaku UMKM serta studi banding ke daerah lain dalam rangka meningkatkan tingkat pengetahuan dan mensosialisasikan hasil produksi sektor UMKM.

### **Daftar Pustaka**

- Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Jakarta.
- Hikmat, R. Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi Revisi. Cetakan Kelima. Humaniora Utama Press. Bandung.
- Miles, Matthew B., A. Micahel Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publications Inc. USA.
- Nurhayati, Sofiah dan Aniek Murniati. 2011. Persepsi Pengusaha UMKM Keramik Dinoyo atas Informasi Akuntansi Keuangan Berbasis Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Atap). *Jurnal JIBEKA* Volume 8 Nomor 1 Februari 2014.
- Tambunan, Tulus. 2009. *UMKM di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Bogor.